

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KINERJA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN**

(Studi kasus pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2019)

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Maulana Agung Triwahyudi

NIM : 31401700104

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PRGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2021

SKRIPSI
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KINERJA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2019)

Disusun Oleh :

Maulana Agung Triwahyudi

NIM : 31401700104

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan panitia sidang ujian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 25 Agustus 2021

Pembimbing



Hendri Setyawan, SE., M.PA

NIK. 0621018204

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KINERJA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2019)

Disusun Oleh :

Maulana Agung Triwahyudi

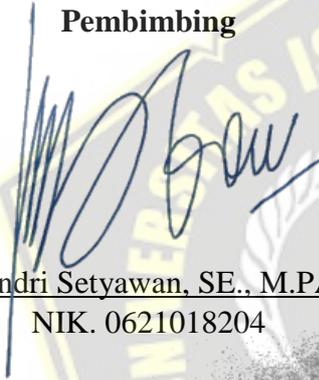
NIM : 31401700104

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal

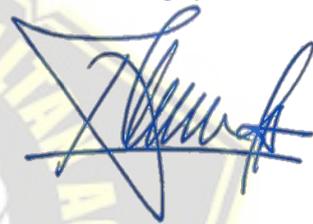
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Hendri Setyawan, SE., M.PA
NIK. 0621018204

Penguji



Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 0610107001

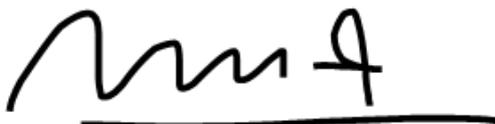
Penguji



Dr. Sri Anik, SE., M.Si
NIK. 0604086802

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Winarsih, SE., M.Si
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Agung Triwahyudi

NIM : 31401700104

Fakultas/ Prodi : Ekonomi/ S1 Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan”** merupakan karya penelitian sendiri dan tidak mengambil atau mencuri sebagian atau keseluruhan tulisan atau karya orang lain. Jika terbukti peneliti meniru karya orang lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi.

Semarang, 25 Agustus 2021
Yang memberi pernyataan



Maulana Agung Triwahyudi
NIM : 31401700104

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Agung Triwahyudi
NIM : 31401700104
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat Asal : Jl. Slamet No.15 RT.02/ RW.01
No.HP/Email : 085727426251/ tagung99@yahoo.co.id

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KINERJA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN”

Saya menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2021
Yang Menyatakan



*Coret yang tidak perlu

Maulana Agung Triwahyudi
NIM : 31401700104

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Agung Triwahyudi

NIM : 31401700105

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat Asal : Jl. Slamet No.15 RT.02/ RW.01

No.Hp / Email : 085727426251/ tagung99@yahoo.co.id

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KINERJA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2021
Yang Menyatakan



Maulana Agung Triwahyudi
NIM : 31401700104

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari suatu urusanmu) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

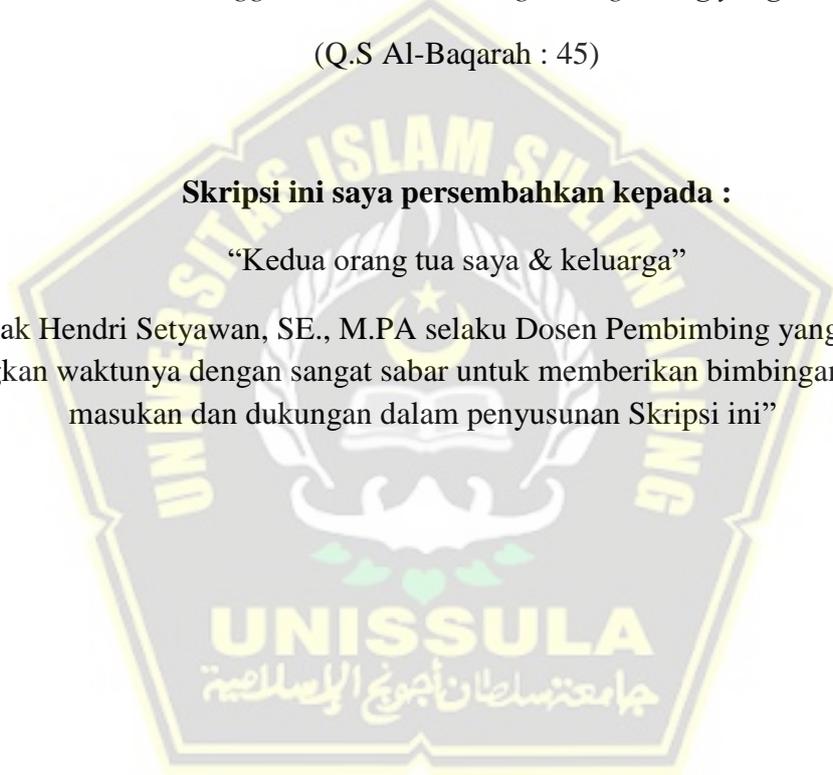
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'

(Q.S Al-Baqarah : 45)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

“Kedua orang tua saya & keluarga”

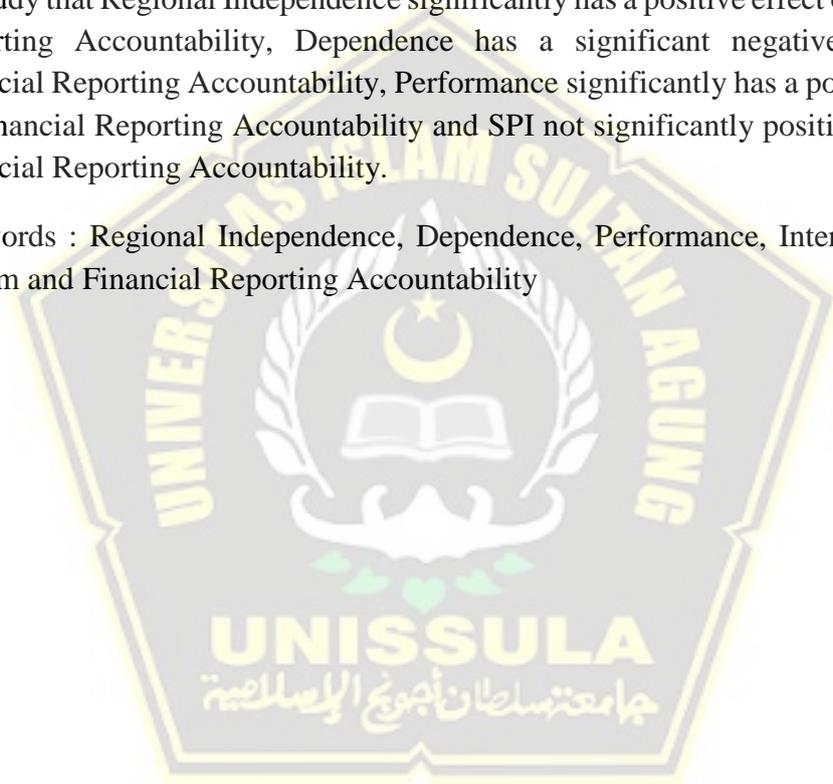
“Bapak Hendri Setyawan, SE., M.PA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini”



ABSTRACT

The development of financial reporting accountability in Central Java has increased significantly. From the results of the audit opinion, BPK expressed an unqualified opinion, but GMPK still noted corruption. The population in this study took in the Regional Government of Central Java Province for the 2018-2019 period. The type of research used is explanatory research. The type of data used is secondary data. The data collection technique used purposive sampling. The number of samples used is 70 (during the 2018-2019 period). The analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS version 23. Based on the results of the study that Regional Independence significantly has a positive effect on Financial Reporting Accountability, Dependence has a significant negative effect on Financial Reporting Accountability, Performance significantly has a positive effect on Financial Reporting Accountability and SPI not significantly positive effect on Financial Reporting Accountability.

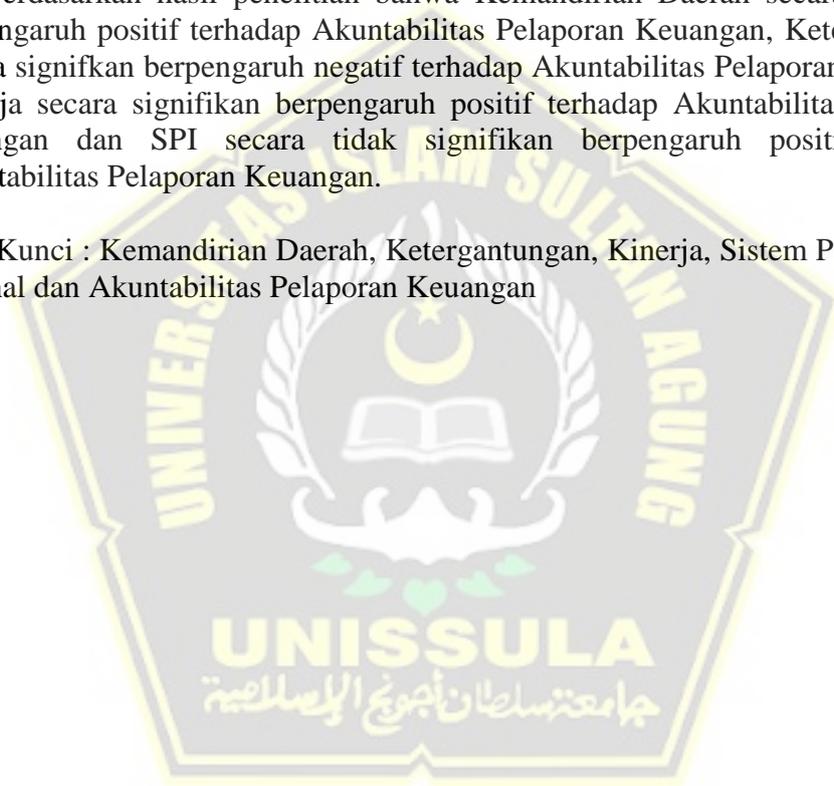
Keywords : Regional Independence, Dependence, Performance, Internal Control System and Financial Reporting Accountability



ABSTRAK

Perkembangan akuntabilitas pelaporan keuangan di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hasil opini audit BPK mengemukakan opini wajar tanpa pengecualian, namun GMPK masih mencatat adanya tindak korupsi. Populasi pada penelitian ini mengambil di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 (selama periode 2018-2019). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kemandirian Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Ketergantungan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Kinerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan dan SPI secara tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Kata Kunci : Kemandirian Daerah, Ketergantungan, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan



INTISARI

Perkembangan akuntabilitas pelaporan keuangan di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilihat dari hasil opini audit BPK terjadi peningkatan dimana jangka waktu tahun 2017-2019 tidak ada pemerintah daerah yang memperoleh opini TW maupun TMP, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah di Jawa tengah telah menyadari pentingnya akuntabilitas pelaporan keuangan.

Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Penelitian ini menguji pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*.

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 (selama periode 2018-2019). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kemandirian Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Ketergantungan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Kinerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan dan SPI secara tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pra Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi syafaat kepada kita semua selaku umatnya.

Dalam penyusunan Pra Skripsi ini, penulis mengambil judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Sistem Pengendalian Internalll terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dalam Studi Kasus Pemerintah Daerah di Jawa Tengah” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam proses penyusunan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

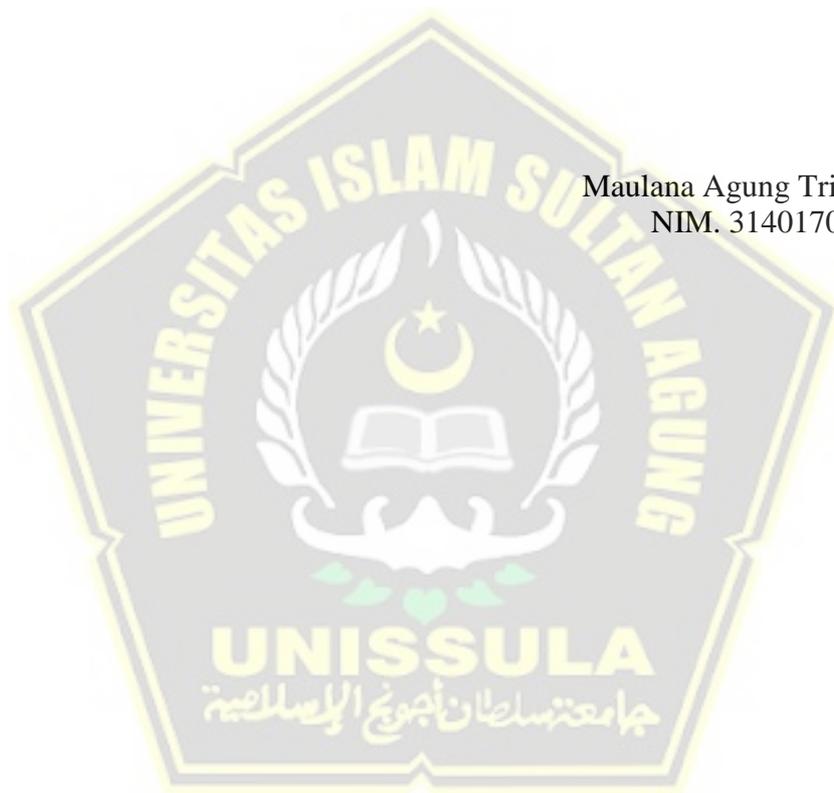
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya karena telah melancarkan segala urusan penulis sehingga proses penyusunan Pra Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Winarsih, SE., M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.

4. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, motivasi, kritik, pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis.
5. Seluruh dosen dan stafkaryawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan praskripsi ini.
6. Kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya yang selalu memberikan doa tiada hentinya, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Semoga Allah SWT selalu merahmati kalian di dunia dan akhirat.
7. Sahabat sahabat saya (Mira, Ical, Alfina, Diah Ayu, Ejak, Aisyah, Irfan, Amel, Esa, Ulik, Rafi, Fajrul, Agnes, Mila, Robidan yang tidak bisa disebutkan satu per satu) yang selama ini telah sudah mendoakan, memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Sinta Ari Nur Riski yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan doa, kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hardwork I wanna thank me for having*

no days off, I wanna thank me for never quitting, for just me being me at all the times.

Semarang, 25 Agustus 2021
Penulis,

Maulana Agung Triwahyudi
NIM. 31401700104



DAFTAR ISI

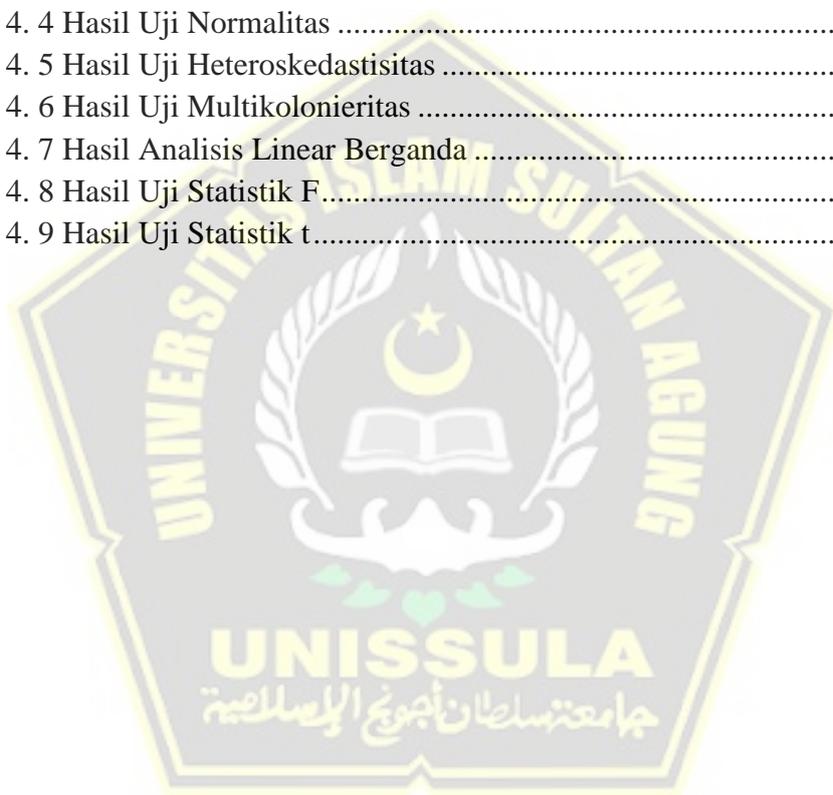
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
INTISARI.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Teori Keagenan.....	11
2.2 Variabel Penelitian	12
2.2.1 Desentralisasi Fiskal	12
2.2.2 Kemandirian Daerah	15
2.2.3 Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat.....	17
2.2.4 Kinerja	18
2.2.5 Sistem pengendalian internal	19
2.2.6 Akuntabilitas keuangan	22
2.3 Penelitian Terdahulu	25

2.4.1	Pengaruh Tingkat kemandirian daerah terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan.....	28
2.4.2	Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan.....	30
2.4.3	Pengaruh Kinerja Penyelenggara Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	31
2.4.4	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	32
2.5	Kerangka Penelitian	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Sumber Data Penelitian	36
3.3	Populasi dan Sampel.....	36
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	37
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
3.6.1	Variabel Dependen.....	38
3.6.2	Variabel independen	38
3.7	Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1	Analisis Deskriptif.....	43
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	43
3.7.3	Analisis Regresi Berganda	46
3.7.4	Uji Hipotesis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.1.1	Populasi dan Sampel	48
4.2	Hasil Analisis Data.....	51
4.2.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	51
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.3.1	Uji Normalitas.....	52
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas	53

4.3.3 Uji Multikolonieritas.....	54
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
4.5 Uji Hipotesis	57
4.5.1 Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)	57
4.5.2 Uji Siginifkansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	59
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
4.6.1 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	61
4.6.2 Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	61
4.6.3 Pengaruh Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	62
4.6.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	62
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel	48
Tabel 4. 2 Data Sampel	49
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolonieritas	55
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Linear Berganda	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik F.....	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik t.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tabulasi.....	69
Lampiran 2 Data Tabulasi Outlier.....	71
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	73
Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	74
Lampiran 5 Analisis Regresi Berganda	76
Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi sebuah perwujudan kebijakan otonomi daerah untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam menerapkan kebebasan masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang demokratis, sesuai dengan amanat. Perwujudan otonomi daerah bertujuan untuk tercapainya pembangunan daerah yang dapat dibentuk melalui peningkatan terhadap kemampuan masyarakat di daerah, baik itu penyesuaian terhadap kondisi dan potensi sumber daya alam disekitar maupun penyesuaian untuk memiliki daya saing yang kuat seiring dengan terus perkembangan globalisasi dan tantangan terhadap pemecahan permasalahan-permasalahan di daerah yang semakin kompleks.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang sangat diperhatikan saat ini. Akuntabilitas publik bagi pemerintah daerah mencakup pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik khususnya reformasi keuangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung karena sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan berasal dari masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan

relevan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah desentralisasi fiskal, kinerja, sistem pengendalian internal. Desentralisasi adalah salah satu komponen yang penting dalam perkembangan demokrasi disuatu negara. Supaya demokrasi dapat berjalan dengan baik, negara memerlukan strategi desentralisasi (Ni Putu S.H. Mimba 2007). Desentralisasi dan demokrasi diciptakan sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi dan desentralisasi tidak menghendaki adanya pemusatan kekuasaan karena kekuasaan yang terpusat akan cenderung disalah gunakan (Carnegie dan West 2005).

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan mulai tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Desentralisasi administrasi tanpa diikuti oleh desentralisasi fiskal dan politik menjadi tidak akan efektif (Gideon, 2001). Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi politis karena jika tidak diikuti dengan pelimpahan wewenang. Desentralisasi fiskal dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan. Pendanaan sendiri akan dapat diterima oleh penyedia dana (investor dan kreditur) jika Pemda memiliki akuntabilitas yang baik. Sehingga, dengan demikian akuntabilitas merupakan suatu

aspek yang harus dijalankan oleh Pemda. Sejalan dengan penelitian tersebut, Sidik (2002) mengungkapkan bahwa desentralisasi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi karena untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer dibutuhkan sumber pembiayaan yang memadai (Moisiu 2013). Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin 2006). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Liu 2007.) dan (Syahrudin 2006) telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi negara seperti peningkatan tingkat pertumbuhan, peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Liu 2007). Giannoni (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (Giannoni, 2002). Disamping itu Moisiu (2013) menyatakan bahwa pemerintah lokal lebih responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. Konsisten dengan pendapat ini, (Mills 1994) menjelaskan bahwa desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat sehingga partisipasi mereka juga akan lebih besar.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan adalah kinerja, Menurut Mulyadi (2007) menguraikan pengertian kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah, maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella 2014) Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan (Syahrudin 2006). Sejalan dengan yang dikemukakan (Sofyani and Akbar 2013), ketika kinerja suatu Pemerintah daerah baik, maka terdapat kecenderungan untuk memberikan akuntabilitas yang baik. Keberhasilan kinerja penyelenggara pemerintah daerah bisa dinilai dari pembangunan dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Saat ini, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, sehingga meminta pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat (Damanik 2011). Supaya kinerja penyelenggara pemerintah memuaskan, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi penyelenggara pemerintah karena ini merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan capaian kegiatan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan “Proses yg integral dalam tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus sang pimpinan dan semua pegawai guna menaruh

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan“. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian intern yg diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah sentra dan pemerintah daerah.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa akibat perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini akan tercapai apabila semua taraf pimpinan menyelenggarakan aktivitas pengendalian atas holistik aktivitas pada instansi masing-masing. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian intern yang bisa memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan aktivitas dalam suatu instansi pemerintah bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern adalah upaya yang dilakukan meliputi unsur-unsur pengendalian intern: lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, keterangan dan komunikasi, dan pemantauan, guna mengarahkan semua aktivitas supaya tujuan menurut aktivitas bisa dicapai secara efektif, efisien, dipercayanya keterangan dandata, dan ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalian intern secara baik dan efektif dalam suatu pemerintahan, maka akan menaikkan kualitas akuntabilitas publik menurut OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.

Perkembangan akuntabilitas pelaporan keuangan di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilihat dari output opini audit BPK terjadi peningkatan dimana jangka waktu tahun 2017-2019 tidak ada pemerintah daerah yang memperoleh opini TW maupun TMP, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah telah menyadari pentingnya akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun catatan GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) mencatat di 2019 ada 95 perkara korupsi yang masuk untuk disidangkan dan 98 perkara di tahun 2018, 2017 mencapai 110 perkara disidangkan di Jawa Tengah, ini menandakan bahwa masih ada tindakan korupsi meskipun laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini belum menandakan pemerintah terbebas dari korupsi. Berdasarkan fenomena yang pernah terjadi menandakan bahwa SKPD Jawa Tengah seharusnya mampu memberikan pertanggungjawabannya atas apa yang telah dituangkan dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah.

Penelitian mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai variabel dependen telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya (Mudhofar and Tahar 2016) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, kinerja pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. (Muraiya and Nadirsyah 2018) menyatakan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. (Ramon 2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern dalam pengujian hipotesis

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

Namun dilain sisi jika dihubungkan dengan korupsi, literatur menunjukkan hasil yang masih mixed. Beberapa literatur mengungkapkan desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan mengurangitingkat korupsi. Namun disisi lain literatur menyebutkan desentralisasi fiskal justru mendorong pemindahan korupsi dari level pemerintah pusat ke daerah (Moisiu, 2013).

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purbasari and Bawono 2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut memotivasi peneliti untuk meneliti dan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh (Mudhofar and Tahar 2016). Selain Desentralisasi Fiskal dan Kinerja, terdapat salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Sistem Pengendalian Internal hal ini berkaitan dengan Laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) dimana Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dengan begitu peneliti mengkonfirmasi untuk menambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada daerah di Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik (Mardiasmo, 2004). Pemerintah daerah juga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal dan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan reseacrh gap diatas ditemukan masih adanya ketidak konsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu perumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?
2. Bagaimana pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?
3. Bagaimana pengaruh Kinerja Penyelenggara Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?
4. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Kemandirian daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
2. Untuk menguji pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
3. Untuk menguji pengaruh Kinerja Penyelenggara Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
4. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi mengenai pentingnya penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat member masukan dan evaluasi bagi para peneliti mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan

3. Bagi Pemerintah Daerah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan keuangan daerah



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan 2013). Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, terdapat dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif merupakan agent dan legislatif merupakan principal. Dalam hubungannya dengan rakyat, legislatif merupakan agent yang membela kepentingan rakyat (principal) (Halim A. 2012).

Konteks Teori agensi umumnya dianggap sebagai pihak yang memaksimalkan dirinya namun ia tetap selalu untuk berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dikatakan efisien jika mendorong pihak yang berkontrak melakukan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil (outcome) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang bisa dilakukan agen. pelaporan keuangan, interaksi antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan (Suwardjono 2010).

Kajian teori keagenan dalam penelitian ini bisa dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk menjalani tugas roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak kepada pemerintah pusat. Jika keputusan agent merugikan principal maka akan timbul masalah keagenan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan tata kelola yang baik yang ditandai dengan peningkatan efisiensi dan kesetaraan (equity), transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat; pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan; pemberdayaan masyarakat serta penyerahan wewenang. Penyerahan wewenang dapat berupa, yang pertama fungsional yaitu pengakuan adanya hak pada seseorang atau golongan untuk mengurus hal-hal tertentu di daerah; kedua yaitu kebudayaan berupa pengakuan adanya hak pada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri di daerah; yang ketiga yaitu politik berupa pengakuan adanya hak mengurus kepentingan sendiri pada badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu. Sedangkan fiskal sendiri berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara (Colfer, Doris, 2006).

Desentralisasi disebut sebagai proses politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perpindahan kekuasaan

pada pemerintah lokal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menstimulasi pembentukan basis pengembangan ekonomi lokal dan nasional, meningkatkan transparansi pemerintahan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Moisiu, 2013). Jadi pengertian desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik dan wajib mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses desentralisasi ini meliputi 3 dimensi yaitu (Colfer, 2006):

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi

Ketiga jenis desentralisasi ini mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut (Mardiasmo 2002) menyebutkan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya

demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal mempunyai fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan dibidang keuangan. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Colfer, 2006:10).

Desentralisasi fiskal jika dikaitkan dengan tujuan pengambilan keputusan menurut Syahrudin (dalam Fontanella dan Rossieta, 2014) dapat didefinisikan dalam 3 cara yaitu : pelepasan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah (dekonsentrasi); pendelegasian wewenang; dan pelimpahan wewenang (devolusi).

Menurut Mardiasmo pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.

4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim A 2001:167) adalah sebagai berikut :

2.2.2 Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut (Mahmudi 2016:140) Kemandirian daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Kemandirian daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Ada beberapa refrensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

a Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi 2016)

b Kemampuan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandaidengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi

c Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. (Bisma, I Dewa Gde & Susanto 2010) menuliskan tentang tujuan pengukuran efektivitas:

“Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan”.

Sedangkan Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2004:133) mengatakan bahwa: “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”.

2.2.3 Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Ketergantungan terhadap pemerintah pusat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil. Menurut Bisma (2010: 78) mengatakan bahwa:

“Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur

dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”).

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah (Halim 2001)

2.2.4 Kinerja

Menurut (Bastian 2014:359), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Serta, menurut Mardiasmo dalam (Kusumawardani 2012) bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan, dan; kemampuan kerja (tentang peralatan).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

2.2.5 Sistem pengendalian internal

Pengendalian Intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesi Akuntan Publik pada Sistem Akuntansi tentang Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraph 06 adalah: Dalam (PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2008), Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Untuk menunjang dan meperkuat efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP). APIP melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang berperan sebagai APIP adalah BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota (PP No. 60 Tahun 2008).

SIP adalah kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi :

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, pengendalian terhadap keandalan pemrosesan data.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur SPI dalam Pemerintah mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan dilingkungan pemerintahan di berbagai Negara yang meliputi:

- a). Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan

mendukung terhadap pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan Pengendalian mencakup:

1. Penegakan integritas dan nilai etika Integritas dan nilai-nilai adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik.
2. Komitmen terhadap kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut dapat berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan.
3. Kepemimpinan yang kondusif Manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Dengan memahami aspek-aspek yang ada dalam filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen akan membuat auditor merasakan sikap manajemen tentang pengendalian intern.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Struktur organisasi suatu membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Ini juga biasanya menghubungkan garis arus komunikasi.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung jawab dan masalah sejenis yang berkaitan pengendalian juga sama pentingnya.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia Aspek penting dalam setiap sistem pengendalian

adalah pegawai. Jika pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lain boleh tidak ada dan laporan keuangan yang andal tetap bisa dihasilkan.

2.2.6 Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap publik atas setiap kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini merupakan laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan merupakan anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan serta hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus memiliki otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Menurut (Mardiasmo 2002), akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Adapun dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum berhubungan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen,

dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan biaya murah.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berhubungan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tanpa ada pemborosan dan kebocorandana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Fontanella 2014)	Tingkat kemandirian daerah Tingkat ketergantungan daerah Kinerja Akuntabilitas pelaporan keuangan	Hasil penelitian ini menyebutkan Kemandirian daerah, Ketergantungan pada pemerintah pusat dan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se	Sistem pengendalian internal Akuntabilitas pelaporan keuangan	Hasil penelitian ini menyebutkan Sistem Pengendalian Intern dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, Semakin baik Sistem

	Provinsi Sumatera Barat(Ramon 2014)		Pengendalian Intern semakin baik pula akuntabilitas keuangan. Dengan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
3.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja(Mudhofar and Tahar 2016)	Desantralisasi fiskal Kemandirian daerah Ketergantungan pada pemerintah pusat Efektivitas Kinerja Akuntabilitas	Hasil Penelitian ini menemukan Kemandirian Daerah dan Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
4.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem	Desentralisasi Fiskal Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Variabel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh

	<p>Pengendalian Internal, dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan(Purbasari and Bawono 2017)</p>	<p>Kinerja Pemerintah Daerah Akuntabilitas Pelaporan Keuangan</p>	<p>terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internberpengaruh signifikan secara negatif terhadapAkuntabilitas Laporan Keuangan, dan Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadapAkuntabilitas Laporan Keuangan</p>
5.	<p>Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh(Muraiya and Nadirsyah 2018)</p>	<p>Desentralisasi Fiskal Efisiensi penyerapan anggaran Efektivitas penyerapan anggaran Akuntabilitas Pelaporan Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, efisiensi penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, dan efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan</p>

Sumber :

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

2.4.1 Pengaruh Tingkat kemandirian daerah terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan

(Syahrudin 2006) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan wewenang kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan. Pendanaan sendiri akan dapat diterima oleh penyedia dana (investor dan kreditor) jika Pemda memiliki akuntabilitas yang baik. Sehingga, dengan demikian akuntabilitas merupakan suatu aspek yang harus dijalankan oleh Pemda.

(Mujiati & Purbasari, 2015) mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah Indonesia menganutsistem pemerintahan yang sentralistik dimana dengansistem pemerintahan tersebut pemerintah daerah tidak bisa berperan aktif dalam pengembangandaerahnya. Dengan adanya kendala tersebut kemudian pemerintah menerapkan otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya karena pemerintah daerah lebih mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh daerahnya dan dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

(Fontanella 2014) menemukan bahwa Desentralisasi Fiskal dalam bentuk Tingkat Kemandirian Daerah dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. (Mudhofar and Tahar 2016) menyatakan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, karena dengan kemandirian daerah yang tinggi sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan mandiri sehingga daerah dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya.

Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris terkait desentralisasi fiskaldan akuntabilitas pelaporan keuangan, maka Hipotesis pertama yang diajukan adalah

H1 : Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

2.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan

Desentralisasi fiskal secara umum memungkinkan suatu daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Fontanella 2014). Pada kondisi mandiri dan ketergantungan pada pemerintah pusat suatu Pemda rendah, seharusnya Pemda akan lebih mampu dalam menjalankan aktivitas keuangannya sendiri, seperti mengatur dan menggali potensi keuangan, penganggaran dan pengalokasian.

Lay (2001) menegaskan bahwa ketika Pemda mendapatkan hak sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dan tidak bergantung pada aturan dan bantuan dari pemerintah pusat, hal itu akan memungkinkan terjadinya pengelolaan potensi daerah yang berbasis kultural secara lebih baik dan progresif. Model pemerintahan desentralisasi dalam bentuk pemberian kewenangan kemandirian pengelolaan daerah ini diyakini dapat memberikan pelayanan umum secara lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin mandiri suatu Pemda, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan semakin baik akuntabilitas yang akan diupayakan oleh Pemda tersebut. Berdasarkan argumentasi yang diuraikan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H2 : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

2.4.3 Pengaruh Kinerja Penyelenggara Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemda, maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella 2014).

(Halim 2012) mengatakan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang memiliki tujuan membantu manager dalam menilai capaian strategi dengan tolak ukur kinerja keuangan dan non keuangan. Lebih lanjut pengukuran kinerja sektor publik di dunia telah berkembang sejak dirintis di Amerika Serikat sekitar tahun 1940-an. Perkembangan tersebut kemudian menyebar ke negara di dunia melalui pengaruh program-program dari organisasi internasional seperti PBB, World Bank, dan IMF (Bawono 2015)

Di Indonesia, perkembangan pengukuran kinerja ditetapkan pada Inpres No 7 tahun 1999 tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dalam perkembangannya memunculkan juga penilaian kinerja lain berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung jawaban). Perkembangan pengukuran kinerja ini memberikan peluang kepada daerah untuk membuktikan diri sebagai daerah terbaik di Indonesia (Bawono 2015).

(Fontanella 2014), konsisten dengan penelitiannya (Lin 2011) yang mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki dampak yang positif dengan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga semakin baik opini kinerja yang diberikan maka semakin tinggi kemungkinannya daerah tersebut memiliki

akuntabilitas laporan keuangan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang ketiga adalah :

H3 : Kinerja penyelenggara pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan

Bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi adalah pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atas keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

(Sari 2012)mengemukakan bahwa dari hasil perhitungan Pengendalian Intern yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan hasil perhitungan dari Transparansi Laporan Keuangan yang diproyeksi dengan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan, pengungkapan hal-hal yang bersifat material, pengungkapan secara berkala dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, kabupaten Cimahi memiliki kategori yang baik dengan masing masing variabel mendapat nilai 80% dan 81,3%. Setelah di uji secara statistik diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian internal dengan transparansi laporan keuangan yang berarti semakin baik pengendalian internal di Kabupaten Cimahi maka transparansi laporan keuangan juga semakin tinggi.

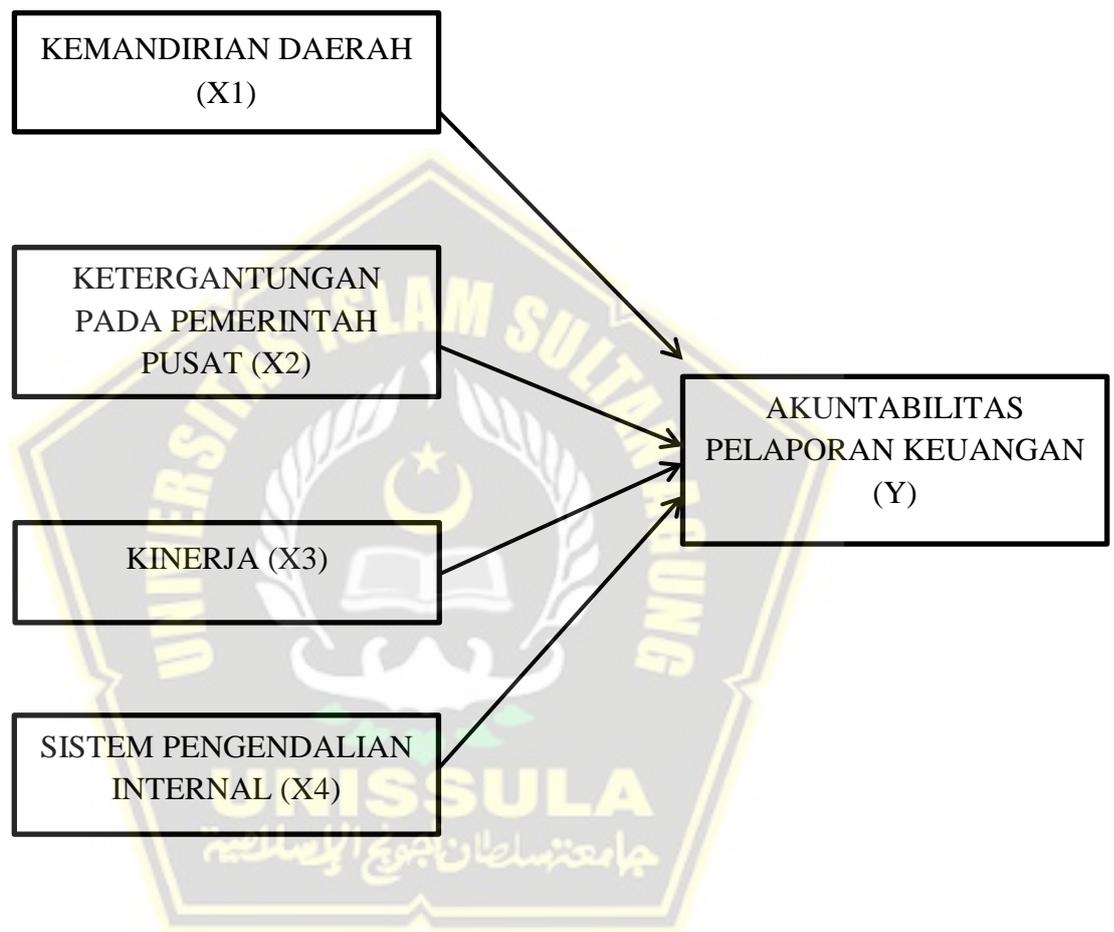
Oleh karena itu, apabila sistem pengendalian internal terlaksana dengan baik maka akuntabilitas akan tercapai (Dewi Asfiryati 2017), karena dengan adanya pengendalian internal mempermudah pelaksanaan aktivitas pemerintah, dan akan menjadi lebih efektif ketika melakukan pembangunan daerah, sehingga mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memperlambat proses untuk mencapai tujuan daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ke empat adalah :

H4 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan



2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis diatas, , maka dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut :



Kerangka pemikiran di atas menggambarkan pengaruh antara Desentralisasi Fiskal yang diproyeksikan dengan Kemandirian daerah dan Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen sedangkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan sebagai variabel dependen. Desentralisasi fiskal, transparansi dan

kinerja, dan Sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi (Explanatory Research). Menurut (Sugiyono 2013) penelitian eksplanasi (explanatory research) merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS), dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) di Indonesia tahun 2018-2019 yang memenuhi kriteria sampel. Data dapat diperoleh melalui website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan BPK.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Tengah. Kriteria pengambilan sampel adalah Pemerintah Kabupaten Kota yang memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dari BPK. Berikut adalah pemilihan sampel berdasarkan kriteria Kota/Kabupaten :

1. Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang terdaftar di BPK tahun 2018-2019

2. Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai laporan keuangan lengkap dan secara rutin mempublikasikan laporan keuangan selama 2018-2019
3. Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama tahun 2018-2019

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002 : 61-63), yang mengatakan bahwa: “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus”.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi. Data dikumpulkan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data dokumenter seperti APBD, laporan hasil pemeriksaan, opini audit, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdapat di BPK dan website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian

Dalam Negeri. Data diperoleh dengan cara mengunduhnya di website BPK dan masing masing website Pemerintah Daerah.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen Desentralisasi Fiskal (X1), Kinerja (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y1).

3.6.1 Variabel Dependen

3.6.1.1 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah yang dalam penelitian ini diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Fontanella 2014). Opini audit dalam penelitian ini akan diukur dengan skala ordinal yang menunjukkan tingkatan atau peringkat mulai dari opini paling rendah sampai yang paling tinggi sebagai berikut :

1= Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),

2= Tidak Wajar (TW),

3= Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

4= Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP),

5= Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.6.2 Variabel independen

3.6.2.1 Desentralisasi Fiskal

Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal diukur dengan dua proksi, yaitu tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Makin tinggi ketergantungan pada pemerintah pusat, maka makin kecil kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik. Desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah (Fontanella 2014). Rumus dari variable-variabel dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$
- b. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat = $\frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}}{\text{Total Pendapatan}}$

3.6.2.2 Kinerja

Dalam penelitian ini dimasukkan variabel Kinerja Pemda yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD ini menggambarkan kinerja kepala daerah dalam periode satu tahun, sehingga harus disusun oleh orang yang berkompeten yang menyajikan data/menggambarkan kondisi suatu daerah antara lain: pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, pendapatan, belanja dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika Pemda melaporkan LPPD dan diberikan skor oleh Kemendagri, Kinerja Pemerintah Daerah yang dikategorikan dengan Sangat Tinggi memiliki nilai 5, Tinggi memiliki nilai 4, Sedang memiliki nilai 3, Rendah memiliki nilai 2 dan Sangat Rendah memiliki nilai 1.

Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah = Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.6.2.3 Sistem Pengendalian Internal

Laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) harus disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang diatur dalam pasal ayat 56 (4) UU No. 01 Tahun 2004. Peran SPI adalah meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nasional. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur Sistem Pengendalian Intern, yaitu PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk merancang Sistem Pengendalian Intern Daerah (SPI)

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyebutkan bahwa salah satu unsur SPIP adalah unsur pemantauan yang dilaksanakan melalui pemantuan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Ukuran	Sumber
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Akuntabilitas pelaporan keuangan adalah pertanggungjela san pemerintah kepada publikterkait aktivitas pemerintah yang diwujudkan melalui laporan keuangan	1=Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), 2=Tidak Wajar (TW), 3=Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4=Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), 5=Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	(Fontanella 2014)
Kamandirian Daerah	Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	(Fontanella 2014)
Ketergantungan pada	Kemampuan pembiayaan daerah bila	$\frac{\text{DAU + DAK}}{\text{Total Pendapatan}}$	(Fontanella 2014)

Pemerintah Pusat	didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah		
Kinerja Penyelenggara Pemerintahan	Kinerja Pemerintah Daerah dalam jangka waktu satu tahun	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikategorikan dengan 5 = Sangat Tinggi 4 = Tinggi 3 = Sedang 2 = Rendah 1 = Sangat Rendah	(Purbasari and Bawono 2017)
Sistem Pengendalian Internal	Unsur pemantauan yang dilaksanakan melalui pemantuan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut	Tindak Lanjut Rekomendasi Se Total Rekomendasi	(PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2008)

	rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya		
--	---	--	--

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda, karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini lebih dari satu variabel bebas. Regresi Linear Berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Pada penelitian ini, analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda di Jawa Tengah.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal. Analisis deskriptif menjelaskan ringkasan tentang jumlah sampel, mean, median, modus, standard deviasi, dan lain-lain.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang *signifikan* dan *representative*, maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Dengan pengujian ini diharapkan agar model regresi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bias disebut BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*) maka asumsi–asumsi

dasar berikut ini harus dipenuhi:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas yaitu untuk menguji suatu variabel dependen dan variabel independen termasuk dalam distribusi data yang normal atau tidak normal. Hasil distribusi data melalui uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan data distribusi normal apabila memiliki nilai signifikan $> 0,05$ atau 5%. Sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ atau 5% maka data distribusi tidak normal.

Uji normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan:

1. Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan
2. *Normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013).

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikannya di atas 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.7.2.3 Uji Multikolinieritas

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel – variabel ini tidak orthogonal (nilai korelasi tidak sama dengan nol). Uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF).

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variable independen terhadap variable dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Rumus untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen yaitu :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

X1 = Desentralisasi Fiskal

X2 = Kinerja

X3 = Sistem Pengendalian Internal

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

e = error term

3.7.4 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah, untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui kebenarannya dengan menggunakan uji hipotesis.

1. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan satu dengan variabel lainnya. Kisaran nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Jika koefisien determinasi mendekati 1 berarti variabel independen mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji statistik F terdapat 2 keputusan kriteria diantaranya yaitu :

- Jika $\text{Sig F} = 0,000 > 0,05$ atau 5%, maka H_0 diterima. Artinya adanya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
- Jika $\text{Sig F} = 0,000 < 0,05$ atau 5%, maka H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Terdapat dua keputusan dalam pengujian hipotesis yang dilakukan melalui uji t yaitu :

- Jika $\text{Sig t} = 0,000 < 0,05$ atau 5%, maka H_0 diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika $\text{Sig t} = 0,000 > 0,05$ atau 5%, maka H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Populasi dan Sampel

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh melalui website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Kementerian Dalam Negeri dan BPK (bpk.go.id). Populasi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah berjumlah 35 Kota/ Kabupaten. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang terdaftar di BPK tahun 2018-2019	35
2.	Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai laporan keuangan lengkap dan secara rutin mempublikasikan laporan keuangan selama 2018-2019	35
3.	Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama tahun 2018-2019	35
	Sampel Penelitian	35
	Periode penelitian (2018-2019)	2
	Data Outlier	(12)

Total Sampel (35 x 2) - 12	58
----------------------------	----

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan kriteria dalam tabel 4.1 diatas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 35 Kota/ Kabupaten yaitu :

Tabel 4. 2
Daftar Sanpel Penelitian

No.	Nama Kota/ Kabupaten
1.	Kabupaten Jepara
2.	Kabupaten Karanganyar
3.	Kabupaten Kebumen
4.	Kabupaten Kendal
5.	Kabupaten Klatenn
6.	Kabupaten Kudus
7.	Kabupaten Magelang
8.	Kabupaten Pati
9.	Kabupaten Pekalongan
10.	Kabupaten Pemalang
11.	Kabupaten Purbalingga
12.	Kabupaten Puworejo
13.	Kabupaten Rembang
14.	Kabupaten Semarang
15.	Kabupaten Sragen
16.	Kabupaten Sukoharjo

17.	Kabupaten Tegal
18.	Kabupaten Temanggung
19.	Kabupaten Wonogiri
20.	Kabupaten Wonosobo
21.	Kota Magelang
22.	Kota Pekalongan
23.	Kota Salatiga
24.	Kota Semarang
25.	Kota Surakarta
26.	Kota Tegal
27.	Kabupaten Demak
28.	Kabupaten Grobogan
29.	Kabupaten Batang
30.	Kabupaten Brebes
31.	Kabupaten Blora
32.	Kabupaten Banyumas
33.	Kabupaten Cilacap
34.	Kabupaten Banjarnegara
35.	Kabupaten Boyolali

Sumber : BPK

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, sum, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini variabel yang digunakan peneliti adalah Desentralisasi Fiskal, Kinerja, SPI, terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif untuk masing-masing variabel :

Tabel 4. 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Kemandirian daerah	58	,14	,54	,2162	,07227
Ketergantungan	58	,32	,76	,5733	,07289
Kinerja	58	4,00	5,00	4,8621	,34784
SPI	58	,03	,98	,5526	,24029
Valid N (listwise)	58				

Sumber : Data Ouput SPSS 23, 2021

Variabel (X1) Kemandirian Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,14 dan nilai maksimum sebesar 0,54. Nilai rata-rata (mean) pada variabel Kemandirian Daerah sebesar 0,2162 lebih besar dari standar deviasinya yaitu sebesar 0,07227, artinya tidak terdapat perbedaan yang tinggi antara data satu dengan data yang lainnya dan persebaran data yang baik.

Variabel (X2) Ketergantungan pada Pemerintah Pusat menunjukkan nilai minimum sebesar 0.32 dan nilai maksimum sebesar 0,76. Nilai rata-rata (mean)

pada variabel Ketergantungan sebesar 0,5733 lebih besar dari standar deviasinya yaitu sebesar 0.07289, artinya tidak terdapat perbedaan yang tinggi antar data satu dengan data yang lainnya dan persebaran data yang baik.

Variabel (X3) Kinerja menunjukkan nilai minimum sebesar 4,00 yang dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) pada variabel Kinerja sebesar 4,862 lebih besar dari standar deviasinya yaitu sebesar 0,34784, artinya tidak terdapat perbedaan yang tinggi antar data satu dengan data yang lainnya dan persebaran data yang baik.

Variabel (X4) Sistem Pengendalian Internal menunjukkan nilai minimum sebesar 0,3 dan nilai maksimum sebesar 0,98. Nilai rata-rata (mean) pada variabel SPI sebesar 0,5526 lebih besar dari standar deviasinya yaitu sebesar 0,24029, artinya tidak terdapat perbedaan yang tinggi antar data satu dengan data yang lainnya dan persebaran data yang baik.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji statistik dalam uji normalitas data yang digunakan yakni menggunakan hasil one simple Kolmogorov-Smirnov. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, maka distribusi data penelitian dinyatakan normal apabila memiliki nilai sig > 0,05. Uji normalitas menggunakan one simple Kolmogorov-Smirnov test sebagai berikut :

Tabel 4. 4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ln_RES
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-2,8871
	Std. Deviation	,46297
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,059
	Negative	-,116
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,050 ^c

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa angka *Asymp. Sig.(2-tailed)* menunjukkan angka 0,050. Hal ini sesuai dengan syarat uji normalitas yaitu jumlah sig harus $> 0,05$. Dapat disimpulkan data sekunder yang diolah merupakan data normal sehingga dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Glejser. Keputusan yang terjadi pada uji glejser yakni apabila nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser :

Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,015	,988
Kemandirian Daerah	-1,039	,304
Ketergantungan Kinerja	,894	,375
SPI	-,579	,565
	-,752	

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan tabel 4.5, uji glejser menunjukkan nilai signifikansi dari variabel Desentralisasi Fiskal, Kinerja, SPI, dan Akuntabilitas Pelaporan Akuntabilitas lebih dari 0,05 . Hal ini sesuai dengan syarat lolos uji heteroskedastisitas yaitu angka sig harus $> 0,05$. Maka dapat diartikan regresi penelitian ini dinyatakan lolos

4.3.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk meguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,901	1,110
X2	,906	1,104
X3	,871	1,147
X4	,886	1,128

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengujian uji multikolonieritas diatas diperoleh nilai *tolerance* semua variabel independen $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja, SPI terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hasil perhitungan koefisien model regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 4. 7

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	5,113	,285	17,952	,000
Kemandirian daerah	,282	,262	1,078	,286
ketergantungan	-,582	,288	-2,021	,048
kinerja	,004	,049	,074	,941
SPI	,226	,083	2,728	,009

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

Dari hasil uji analisis linier berganda diatas dapat dilihat bahwa pengaruh Kemandirian Daerah, Ketergantungan, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 5,113 + 0,282 \text{ Kemandirian Daerah} - 0,582 \text{ Ketergantungan} + 0,004 \text{ Kinerja} + 0,226 \text{ SPI} + e$$

Dari persamaan model regresi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5,113 dan nilai sig 0,00 (> 5%), artinya konstantanya dianggap bernilai 0. Hal ini berarti jika semua variabel independen dianggap konstan maka Akuntabilitas adalah tetap.
2. Nilai koefisien Kemandirian Daerah sebesar 0,282 dan angka sig 0,286 , artinya Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi Kemandirian Daerah maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

3. Nilai koefisien Ketergantungan sebesar -0,582 dan nilai sig 0,048, artinya Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan maka akan menurunkan tingkat Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.
4. Nilai koefisien Kinerja sebesar 0,004 dan angka sig 0,941, artinya Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Semakin baik Kinerja pemerintah maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan akan semakin akuntabel.
5. Nilai koefisien SPI sebesar 0,226 dan angka sig 0,009, artinya SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Semakin baik Sistem Pengendalian internal Pemerintah maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan akan semakin akuntabel.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinan (R^2)

Dengan melihat hasil koefisien determinan pada kolom Adjusted R Square (R^2) maka sampel dalam penelitian ini diidentifikasi yaitu sampel total. Berikut ialah hasil uji koefisien determinasi, yaitu :

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
.338 ^a	.151	.087

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

Dapat ditentukan model regresi dengan nilai R^2 (*Adjusted R Square*) sebesar 0,087 atau 8,7%. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian daerah, ketergantungan, kinerja dan SPI sebesar 8,7%. Besaran sisanya yaitu 91,3% ($100\% - 8,7\% = 91,3\%$) terhadap pada variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)

Uji Statistika F digunakan untuk menguji seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji F yakni apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan secara bersamaan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas dengan variabel terikat dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan ketentuan tersebut, maka hasil dari uji signifikansi simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Statitik F

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,151	2,350	4	53	,000

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 2.350 dengan nilai Sig 0,000. Karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas atau dapat dikatakan bahwa

Kemandirian Daerah, Ketergantungan, Kinerja, dan SPI secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara parsial signifikansi terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 10
Hasil Uji Statistik t

Keterangan	t	Sig.
Kemandirian daerah	17,952	,000
ketergantungan	1,078	,286
kinerja	-2,021	,048
SPI	,074	,941
	2,728	,009

Sumber : Data Output SPSS 23, 2021

1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian secara parsial Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien b 0,282, dimana nilai signifikansi 0,286 > 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H1) **diterima**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa variabel Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

2. Pengaruh Ketergantungan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian secara parsial Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien b $-0,582$, dimana nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H2) **diterima** Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa variabel Ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas.

3. Pengaruh Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian secara parsial Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien b $0,004$, dimana nilai signifikansi $0,941 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H3) **diterima**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa variabel Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

4. Pengaruh SPI terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian secara parsial SPI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien b $0,226$ dimana nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H4) **diterima**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa variabel SPI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan

Keuangan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. Artinya bahwa kemandirian daerah pendapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan kemandirian daerah yang tinggi pemerintah daerah dapat membiayai belanja daerah dengan mandiri sehingga daerah dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar & Tahar (2016) yang menyatakan bahwa Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan

4.6.2 Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh Ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan dapat dinyatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Artinya Pada kondisi mandiri dan ketergantungan pada pemerintah pusat suatu Pemda rendah, Pemda lebih mampu dalam menjalankan aktivitas keuangannya sendiri, seperti mengatur dan menggali potensi keuangan, penganggaran dan pengalokasian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin mandiri suatu Pemda, maka semakin rendah tingkat

ketergantungan pada pemerintah pusat dan semakin baik akuntabilitas yang akan diupayakan oleh Pemda tersebut.

4.6.3 Pengaruh Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dari uji hipotesis membuktikan bahwa Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. Kinerja pemerintah daerah memiliki dampak yang positif dengan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga semakin baik opini kinerja yang diberikan maka semakin tinggi kemungkinannya daerah tersebut memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang tinggi

4.6.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian SPI terhadap Akuntabilitas, dapat dinyatakan bahwa SPI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. Artinya apabila sistem pengendalian internal terlaksana dengan baik maka akuntabilitas akan tercapai, karena dengan adanya pengendalian internal mempermudah pelaksanaan aktivitas pemerintah, dan akan menjadi lebih efektif ketika melakukan pembangunan daerah, sehingga mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memperlambat proses untuk mencapai tujuan daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian daerah suatu pemda maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pemda
2. Variabel Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. hal ini ditunjukkan semakin mandiri suatu pemda maka semakin kecil tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.
3. Variabel Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, semakin baik kinerja pemerintah maka semakin tinggi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang dihasilkan
4. Variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan. Artinya apabila sistem pengendalian internal terlaksana dengan baik maka akuntabilitas akan tercapai, karena dengan adanya pengendalian internal mempermudah pelaksanaan aktivitas pemerintah, dan akan menjadi lebih efektif ketika melakukan pembangunan

daerah, sehingga mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memperlambat proses untuk mencapai tujuan daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Hasil angka pada uji koefisien determinasi (R^2) yang sangat rendah. Hal ini berarti masih banyak variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.
2. Tahun pengamatan dalam penelitian dapat dikatakan terlalu singkat, yaitu hanya dari tahun 2018 hingga tahun 2019 sehingga membuat jumlah sample penelitian relatif sedikit. Oleh karena itu dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperpanjang periode pengamatannya agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih valid.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan serta kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan untuk Pemerintah Daerah yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti sebaiknya menambah variabel variabel yang berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti efektivitas penyerapan anggran, standar akuntansi.
 - b. Peneliti sabaiknya menambah periode penelitian menjadi 5 tahun untuk melihat tren penelitian yang ada dan menggunakan data terbaru agar dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

2. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mampu memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bawono, Andy Dwi Bayu. 2015. "The Role of Performance-Based Budgeting in the Indonesian Public Sector."
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007." *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. 4.*
- Carnegie dan West. 2005. *Making Accounting Accountable in the Public Sector. Critical Perspective on Accounting (Vol.16), Pp.905-928.* 16th ed.
- Carol J. Pierce Colfer, Doris. 2006. Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat: Pengalaman di berbagai Negara *Desentralisasi Sektor Kehutanan: Pengalaman Indonesia.*
www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BColfer0602.pdf.
- Damanik. 2011. Phys. Rev. E "Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintahan Kota Binjai." Universitas Sumatera Utara.
- Dewi Asfiryati. 2017. "Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia." *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai) 4(2006): 1–13.*
- Fontanella, A M Y. 2014. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia." : 1–24.
- Halim. 2001. *Managemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. 2012. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ichsan. 2013. "Teori Keagenan (Agency Theory)." (<https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agencytheory/>).
- Jogiyanto. 2014. *Analisis Dan Desain Sistem Informasi, Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusumawardani. 2012. "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 1(1).
- Lin. 2011. "Applying Integrated EA/AHP to Evaluate the Economic Performance of Local Governments in China." *Journal of Operational Research*, 209 (2011) 129–140 209: 129–40.
- Liu. 2007. "What Type of Fiscal Decentralization System."
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mills, A. 1994. *Decentralization and Accountability in The Health Sector From an*

- International Perspective: What Are The Choices?. Public Administration and Development, Vol. 14. SNA.*
- Moisiu. 2013. "Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109: 459–63. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.490>.
- Mudhofar, Kurniatul, and Afrizal Tahar. 2016. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Efek Moderasi Dari Kinerja." 17(2): 176–85.
- Muraiya, and Nadirsyah. 2018. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh." *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi* 3(2): 236–53.
- Nasional, Seminar, D A N Call, F O R Paper, and Program Studi Akuntansi-feb Ums. 2014. "Seminar Nasional Dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-Feb Ums, 25 Juni 2014." : 671–88.
- Ni Putu S.H. Mimba. 2007. "Public Sector Performance Measurement in Developing Countries: A Literature Review and Research Agenda." *Journal of Accounting & Organizational Change* 3(3): 192–208.
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008. *PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Purbasari, Heppy, and Andy Dwi Bayu Bawono. 2017. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(2): 102–8.
- Ramon, Dolly. 2014. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Akuntansi* 2(2): 1–19. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1049>.
- Sari, Diana. 2012. "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional*: 718–27. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1914>.
- Sofyani, Hafiez, and Rusdi Akbar. 2013. "Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 10(2): 184–205.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan Dan Sarana Interpretatif*. Yogyakarta: BPFE: Yogyakarta.
- Syahrudin. 2006. "Abstrak." *Desentralisasi Fiskal : Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi yang Konsisten*.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Data Tabulasi

Kota&kab. jawa tengah	Tahun	Akuntabilitas	kemandirian daerah	Ketergantungan	Kinerja	SPI
Kab. Jepara	2018	5	0,22	0,58	5	0,57
	2019	5	0,25	0,63	5	0,77
Kab. Karanganyar	2018	5	0,23	0,61	5	0,47
	2019	5	0,21	0,61	5	0,91
Kab. Kendal	2018	5	0,16	0,59	5	0,38
	2019	5	0,16	0,59	5	0,35
Kab. Klaten	2018	5	0,15	0,62	5	0,49
	2019	5	0,16	0,61	5	0,70
Kab. Kudus	2018	5	0,17	0,54	5	0,62
	2019	5	0,16	0,32	5	0,03
Kab. Magelang	2018	4	0,14	0,59	5	0,04
	2019	5	0,16	0,55	5	0,40
Kab. Pati	2018	5	0,14	0,48	5	0,71
	2019	5	0,18	0,57	5	0,56
Kab. Purbalingga	2018	5	0,18	0,62	5	0,60
	2019	5	0,15	0,4	5	0,30
Kab. Purworejo	2018	5	0,33	0,6	5	0,69
	2019	5	0,27	0,46	5	0,26
Kab. Rembang	2018	5	0,2	0,45	4	0,23
	2019	5	0,17	0,56	5	0,76
Kab. Semarang	2018	5	0,18	0,6	5	0,81
	2019	5	0,19	0,57	5	0,86
Kab. Sukoharjo	2018	5	0,2	0,58	5	0,79
	2019	5	0,21	0,57	5	0,86
Kab. Tegal	2018	5	0,15	0,59	4	0,92
	2019	5	0,16	0,57	5	0,53
Kab. Temanggung	2018	5	0,18	0,59	5	0,51
	2019	5	0,17	0,58	5	0,50
Kab. Wonogiri	2018	5	0,37	0,65	4	0,95
	2019	5	0,28	0,64	4	0,60
Kab. Wonosobo	2018	5	0,15	0,6	5	0,50
	2019	5	0,17	0,62	5	0,38
Kota Magelang	2018	5	0,28	0,6	5	0,81
	2019	5	0,28	0,57	5	0,67
Kota Pekalongan	2018	5	0,2	0,62	5	0,60
	2019	5	0,22	0,61	5	0,94
Kota Salatiga	2018	5	0,23	0,6	5	0,86
	2019	5	0,25	0,59	5	0,32
Kota Tegal	2018	5	0,3	0,58	5	0,43

	2019	5	0,28	0,6	5	0,23
Kab. Demak	2018	5	0,16	0,55	5	0,78
	2019	5	0,17	0,33	5	0,03
Kab. Grobogan	2018	5	0,19	0,41	5	0,28
	2019	5	0,28	0,59	5	0,56
Kab. Batang	2018	5	0,26	0,59	4	0,43
	2019	5	0,22	0,6	5	0,37
Kab. Brebes	2018	5	0,2	0,6	4	0,67
	2019	5	0,18	0,6	5	0,33
Kab. Blora	2018	5	0,2	0,59	5	0,58
	2019	5	0,16	0,59	5	0,32
Kab. Banyumas	2018	5	0,2	0,57	5	0,67
	2019	5	0,2	0,56	5	0,58
Kab. Cilacap	2018	5	0,2	0,59	4	0,67
	2019	5	0,17	0,57	5	0,24
Kab. Banjarnegara	2018	5	0,38	0,64	4	0,75
	2019	5	0,27	0,63	5	0,31
Kab. Boyolali	2018	5	0,54	0,76	5	0,98
	2019	5	0,34	0,6	5	0,58
Kab. Kebumen	2018	5	0,11	0,61	4	0,40
	2019	5	0,15	0,59	5	0,47
Kab. Pekalongan	2018	5	0,15	0,60	5	0,76
	2019	5	0,16	0,60	5	0,39
Kab. Pemasang	2018	5	0,12	0,62	5	0,60
	2019	5	0,13	0,60	5	0,03
Kota Semarang	2018	5	0,18	0,60	5	0,81
	2019	5	0,19	0,57	5	0,14
Kota Surakarta	2018	5	0,28	0,56	5	0,77
	2019	5	0,28	0,55	5	0,55
Kab. Sragen	2018	5	0,15	0,63	5	0,74
	2019	5	0,16	0,61	5	0,38

Lampiran 2 Data Tabulasi Outlier

Kota&kab. jawa tengah	Tahun	Akuntabilitas	kemandirian daerah	Ketergantungan	Kinerja	SPI
Kab. Jepara	2018	5	0,22	0,58	5	0,57
	2019	5	0,25	0,63	5	0,77
Kab. Karanganyar	2018	5	0,23	0,61	5	0,47
	2019	5	0,21	0,61	5	0,91
Kab. Kendal	2018	5	0,16	0,59	5	0,38
	2019	5	0,16	0,59	5	0,35
Kab. Klaten	2018	5	0,15	0,62	5	0,49
	2019	5	0,16	0,61	5	0,7
Kab. Kudus	2018	5	0,17	0,54	5	0,62
	2019	5	0,16	0,32	5	0,03
Kab. Magelang	2018	4	0,14	0,59	5	0,04
	2019	5	0,16	0,55	5	0,4
Kab. Pati	2018	5	0,14	0,48	5	0,71
	2019	5	0,18	0,57	5	0,56
Kab. Purbalingga	2018	5	0,18	0,62	5	0,6
	2019	5	0,15	0,4	5	0,3
Kab. Purworejo	2018	5	0,33	0,6	5	0,69
	2019	5	0,27	0,46	5	0,26
Kab. Rembang	2018	5	0,2	0,45	4	0,23
	2019	5	0,17	0,56	5	0,76
Kab. Semarang	2018	5	0,18	0,6	5	0,81
	2019	5	0,19	0,57	5	0,86
Kab. Sukoharjo	2018	5	0,2	0,58	5	0,79
	2019	5	0,21	0,57	5	0,86
Kab. Tegal	2018	5	0,15	0,59	4	0,92
	2019	5	0,16	0,57	5	0,53
Kab. Temanggung	2018	5	0,18	0,59	5	0,51
	2019	5	0,17	0,58	5	0,5
Kab. Wonogiri	2018	5	0,37	0,65	4	0,95
	2019	5	0,28	0,64	4	0,6
Kab. Wonosobo	2018	5	0,15	0,6	5	0,5
	2019	5	0,17	0,62	5	0,38
Kota Magelang	2018	5	0,28	0,6	5	0,81
	2019	5	0,28	0,57	5	0,67
Kota Pekalongan	2018	5	0,2	0,62	5	0,6
	2019	5	0,22	0,61	5	0,94
Kota Salatiga	2018	5	0,23	0,6	5	0,86
	2019	5	0,25	0,59	5	0,32
Kota Tegal	2018	5	0,3	0,58	5	0,43

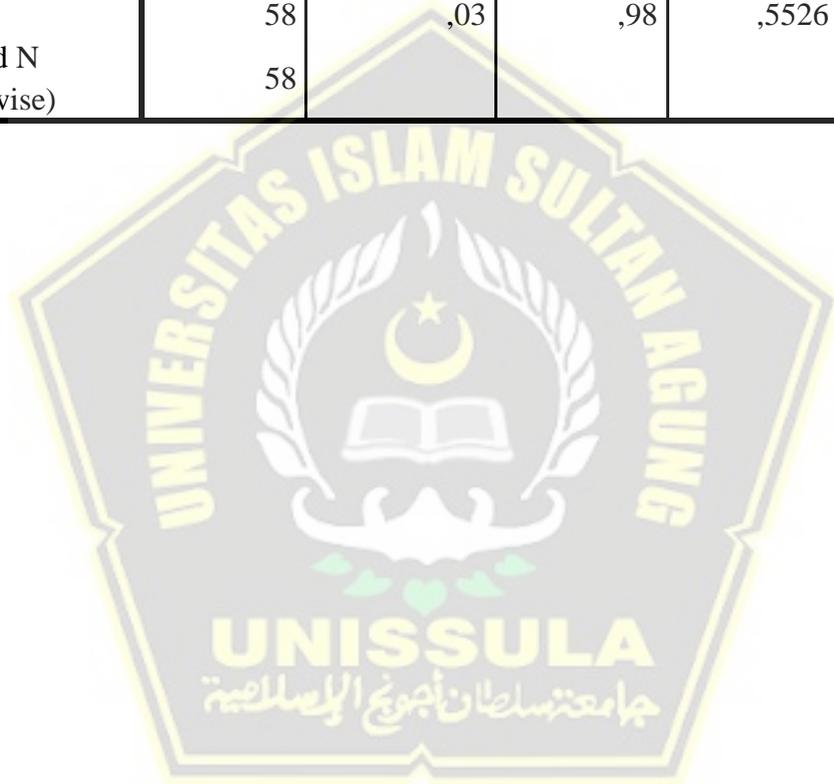
	2019	5	0,28	0,6	5	0,23
Kab. Demak	2018	5	0,16	0,55	5	0,78
	2019	5	0,17	0,33	5	0,03
Kab. Grobogan	2018	5	0,19	0,41	5	0,28
	2019	5	0,28	0,59	5	0,56
Kab. Batang	2018	5	0,26	0,59	4	0,43
	2019	5	0,22	0,6	5	0,37
Kab. Brebes	2018	5	0,2	0,6	4	0,67
	2019	5	0,18	0,6	5	0,33
Kab. Blora	2018	5	0,2	0,59	5	0,58
	2019	5	0,16	0,59	5	0,32
Kab. Banyumas	2018	5	0,2	0,57	5	0,67
	2019	5	0,2	0,56	5	0,58
Kab. Cilacap	2018	5	0,2	0,59	4	0,67
	2019	5	0,17	0,57	5	0,24
Kab. Banjarnegara	2018	5	0,38	0,64	4	0,75
	2019	5	0,27	0,63	5	0,31
Kab. Boyolali	2018	5	0,54	0,76	5	0,98
	2019	5	0,34	0,6	5	0,58



Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Kemandirian daerah	58	,14	,54	,2162	,07227
ketergantungan	58	,32	,76	,5733	,07289
kinerja	58	4,00	5,00	4,8621	,34784
SPI	58	,03	,98	,5526	,24029
Valid N (listwise)	58				



Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ln_RES
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-2,8871
	Std. Deviation	,46297
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,059
	Negative	-,116
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,050 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,015	,988
X1	-1,039	,304
X2	,894	,375
X3	-,579	,565
4	-,752	

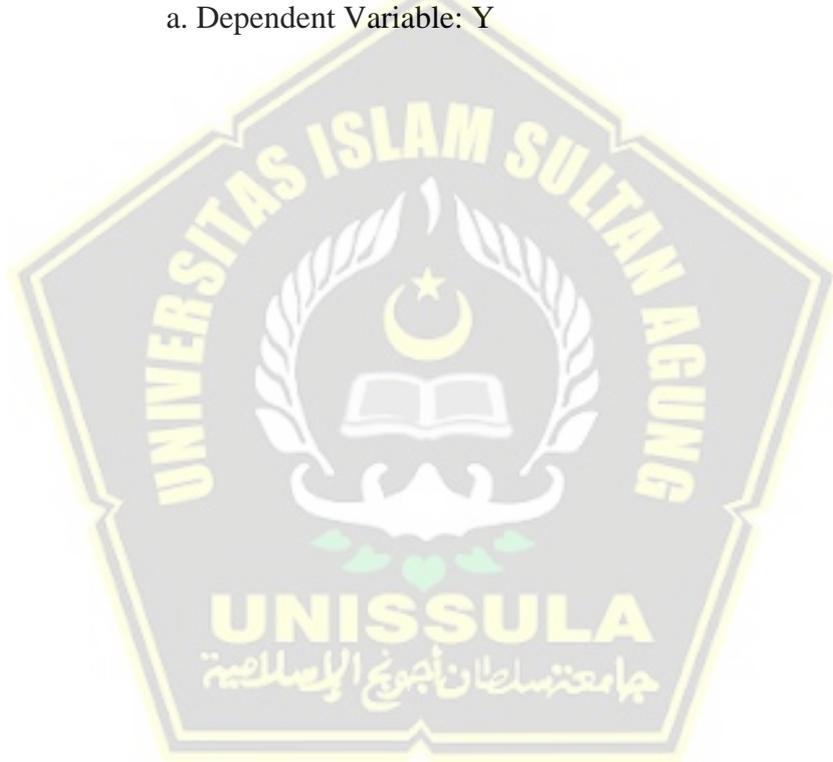
a. Dependent Variable: ABS_RES

3. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,901	1,110
X2	,906	1,104
X3	,871	1,147
X4	,886	1,128

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 5 Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,113	,285		17,952	,000
Kemandirian daerah	,282	,262	,155	1,078	,286
ketergantungan	-,582	,288	-,323	-2,021	,048
kinerja	,004	,049	,010	,074	,941
SPI	,226	,083	,414	2,728	,009

a. Dependent Variable: Akuntabilitas



Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,388 ^a	,151	,087	,12550

- a. Predictors: (Constant), SPI, kinerja, Kemandirian daerah, ketergantungan
 b. Dependent Variable: Akuntabilitas

2. Hasil Uji Statistik F

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,388 ^a	,151	,087	,12550	,151	2,350	4	53	,066

- a. Predictors: (Constant), SPI, kinerja, Kemandirian daerah, ketergantungan
 b. Dependent Variable: Akuntabilitas

3. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,113	,285		17,952	,000
Kemandirian daerah	,282	,262	,155	1,078	,286
ketergantungan kinerja	-,582	,288	-,323	-2,021	,048
SPI	,004	,049	,010	,074	,941
	,226	,083	,414	2,728	,009

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

